

Pelelemahan Civic Culture sebagai Faktor Resesi Demokrasi Indonesia: Analisis Kepercayaan Publik dan Partisipasi Politik

Nirmala Cahya Kusuma¹ T Heru Nurgiansah²

Program Studi Teknologi Rekayasa Material Maju, Jurusan Teknik Pengecoran Logam, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2}

Email: nircahyaya@gmail.com¹

Abstrak

Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang mengarah pada gejala resesi demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelelemahan Civic Culture (budaya kewarganegaraan) sebagai faktor prediktif utama dari kemunduran ini, dengan fokus pada dua indikator sentral: kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan perubahan pola partisipasi politik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis data sekunder dari lembaga survei kredibel serta laporan riset akademik, penelitian ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik secara gradual dalam satu dekade terakhir, yang diperparah oleh polarisasi politik dan penyebaran disinformasi. Di sisi lain, partisipasi politik konvensional yang berbasis pada keterlibatan diskursif di ruang publik mulai tergantikan oleh mobilisasi digital yang rentan terhadap sentimen primordial dan populisme. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelelemahan nilai-nilai kewarganegaraan seperti kepercayaan interpersonal, toleransi, dan komitmen terhadap proses demokrasi secara langsung berkontribusi pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Pelelemahan Civic Culture ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk delegitimasi institusi demokrasi, penguatan politik identitas, dan menyusutnya ruang bagi masyarakat sipil yang kritis. Oleh karena itu, revitalisasi Civic Culture menjadi prasyarat krusial untuk membendung laju resesi demokrasi dan mengkonsolidasikan kembali fondasi demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Civic Culture, Resesi Demokrasi, Kepercayaan Publik, Partisipasi Politik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pasca-reformasi 1998, Indonesia diakui sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang berhasil melakukan transisi dari rezim otoriter. Namun, dalam satu dekade terakhir, berbagai lembaga pemantau demokrasi internasional seperti Freedom House, The Economist Intelligence Unit (EIU), dan V-Dem Institute secara konsisten melaporkan adanya stagnasi bahkan kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Fenomena yang dikenal sebagai resesi demokrasi ini ditandai oleh sejumlah indikator, antara lain pelelemahan institusi pengawas (seperti Komisi Pemberantasan Korupsi), penyempitan ruang kebebasan sipil, meningkatnya polarisasi politik, serta menguatnya populisme dan politik identitas. Kemunduran ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai akar permasalahannya. Berbagai studi telah menyoroti faktor-faktor seperti oligarki, korupsi politik, dan kelemahan partai politik. Namun, argumen yang sering terabaikan adalah kondisi Civic Culture atau budaya kewarganegaraan sebagai fondasi sosiologis dari sebuah sistem demokrasi yang sehat. Sebagaimana diteorikan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam karya klasiknya *The Civic Culture*, demokrasi yang stabil mensyaratkan adanya budaya politik partisipatif yang diimbangi oleh kepercayaan terhadap sesama warga negara dan institusi politik, serta penghargaan terhadap norma-norma demokrasi. Artikel ini berargumen bahwa pelelemahan Civic Culture di Indonesia merupakan faktor prediktif utama yang menjelaskan tren resesi demokrasi saat ini. Pelelemahan tersebut

secara spesifik dianalisis melalui dua manifestasi utamanya: menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi kunci demokrasi dan perubahan corak partisipasi politik masyarakat. Dengan menganalisis kedua indikator ini, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pelemahan nilai-nilai kewarganegaraan secara langsung berkorelasi dengan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada kajian literatur. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelaah gejala sosial-politik yang berkaitan dengan Civic Culture, terutama dalam memahami kecenderungan pelemahan nilai dan dampaknya terhadap demokrasi. Data penelitian bersumber dari berbagai literatur akademik, seperti karya Almond dan Verba (1963) serta Putnam (1993), artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder dari lembaga survei nasional, seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, dan Saiful Mujani Research Center (SMRC). Untuk melengkapi analisis, digunakan pula laporan dari lembaga internasional, antara lain Freedom House, Economist Intelligence Unit (EIU), dan Varieties of Democracy (V-Dem Institute). Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi, yaitu menelaah dokumen dan laporan untuk menemukan pola dan kecenderungan utama terkait kepercayaan publik, partisipasi politik, dan polarisasi sosial. Hasil dari berbagai sumber dibandingkan untuk meningkatkan ketepatan interpretasi. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelemahan Civic Culture di Indonesia serta kaitannya dengan penurunan kualitas demokrasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data survei menunjukkan adanya penurunan signifikan kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi formal. DPR memperoleh tingkat kepercayaan sekitar 32%, partai politik di bawah 20%, sedangkan presiden relatif stabil di kisaran 55–70% (Indikator, 2023; LSI, 2023). Partisipasi non-elektoral, seperti keterlibatan dalam forum musyawarah atau organisasi masyarakat, juga rendah. Fenomena ini diperkuat oleh berbagai aksi protes jalanan, mulai dari demonstrasi mahasiswa 1998, revisi UU KPK dan UU KUHP 2019, hingga aksi 25–29 Agustus 2025. Laporan Freedom House (2024) dan EIU Democracy Index (2024) menunjukkan penurunan skor demokrasi Indonesia dari 61/100 menjadi 58/100, terutama pada indikator civil liberties dan political participation. Hal ini menunjukkan adanya resesi demokrasi yang sejalan dengan pelemahan Civic Culture.

Konsep Civic Culture

Konsep Civic Culture pertama kali diperkenalkan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam buku monumental mereka, "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations" (1963). Teori ini muncul dari pertanyaan besar: Mengapa demokrasi bisa stabil dan berkembang di beberapa negara, tetapi gagal di negara lain? Jawaban mereka terletak pada budaya politik yang dominan di masyarakat tersebut. Menurut Almond dan Verba, Civic Culture adalah sebuah budaya politik campuran yang dianggap paling ideal untuk menopang demokrasi yang stabil. Budaya ini merupakan perpaduan dari tiga tipe budaya politik murni:

1. Budaya Politik Parokial (Parochial Culture). Dalam budaya ini, kesadaran warga negara terhadap objek-objek politik nasional (seperti pemerintah pusat, pemilu, atau kebijakan nasional) sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Fokus mereka terbatas pada lingkup lokal yang sempit seperti suku, desa, atau komunitas keagamaan. Mereka tidak memiliki ekspektasi apa pun dari sistem politik dan tidak merasa perlu untuk berpartisipasi.

2. Budaya Politik Subjek/Kaula (Subject Culture). Pada level ini, warga negara sudah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap sistem politik nasional dan output-nya (misalnya, hukum dan kebijakan). Namun, mereka memposisikan diri secara pasif, sebagai "subjek" atau "kaula" dari pemerintah. Mereka sadar akan adanya otoritas pemerintah dan cenderung patuh, tetapi tingkat partisipasi mereka dalam proses politik (input) sangat rendah. Mereka tidak merasa memiliki kapasitas untuk memengaruhi kebijakan.
3. Budaya Politik Partisipan (Participant Culture). Di sini, warga negara memiliki kesadaran yang tinggi baik terhadap sistem politik (input dan output) maupun terhadap peran mereka di dalamnya. Mereka secara aktif terlibat dalam proses politik, merasa memiliki hak dan kompetensi untuk memengaruhi keputusan pemerintah, dan memiliki orientasi positif terhadap partisipasi.

Menurut Almond dan Verba, demokrasi yang stabil justru tidak ditopang oleh budaya partisipan murni yang berisiko membebani sistem politik dengan tuntutan publik terus-menerus. Sebaliknya, fondasi demokrasi yang ideal adalah Civic Culture, sebuah campuran budaya politik yang seimbang. Meskipun didominasi oleh semangat partisipatif warga yang aktif dan sadar politik, budaya ini diimbangi oleh elemen subjek yang menumbuhkan rasa hormat pada otoritas dan hukum demi menjaga ketertiban, serta elemen parokial yang memungkinkan warga fokus pada kehidupan pribadi sehingga memberi ruang bagi pemerintah untuk memerintah secara efektif. Pada intinya, Civic Culture menciptakan warga negara yang seimbang: mereka aktif dan kritis, tetapi sekaligus patuh dan percaya pada sistem, serta bijaksana dalam menentukan kapan harus berpartisipasi dan kapan harus memberi kepercayaan kepada institusi untuk bekerja.

Pelembahan Kepercayaan Publik: Runtuhnya Pilar "Subjek" dalam Civic Culture

Salah satu pilar utama Civic Culture adalah adanya orientasi "subjek" yang sehat, yaitu kepercayaan dan kepatuhan warga negara terhadap institusi politik yang sah. Tanpa kepercayaan ini, pemerintah dan lembaga negara akan kehilangan legitimasi dan kapasitasnya untuk memerintah secara efektif. Data empiris di Indonesia menunjukkan pilar ini sedang mengalami keretakan serius.

1. Delegitimasi Institusi Perwakilan. Temuan dari berbagai lembaga survei secara konsisten menempatkan partai politik dan parlemen (DPR) pada peringkat terendah dalam hal kepercayaan publik. Institusi-institusi ini, yang seharusnya menjadi wadah partisipasi, justru dipersepsi sebagai sarang korupsi, elitisme, dan politik transaksional. Dari perspektif Civic Culture, ini adalah sinyal bahaya. Ketika warga tidak lagi percaya pada mekanisme perwakilan, orientasi partisipatif mereka kehilangan saluran yang konstruktif dan dapat beralih ke cara-cara di luar sistem yang lebih disruptif.
2. Pelembahan Lembaga Penegak Hukum dan Etika. Kepercayaan publik juga tergerus pada lembaga penegak hukum dan lembaga independen. Kasus pelembahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi undang-undang pada tahun 2019 menjadi contoh paling nyata. Hilangnya kepercayaan pada lembaga yang menjadi tumpuan pemberantasan korupsi ini merusak keyakinan publik bahwa sistem politik mampu membersihkan dirinya sendiri. Ini mendorong sikap apatis dan sinisme, yang merupakan antitesis dari semangat kewarganegaraan yang percaya pada supremasi hukum.
3. Dampak Polarisasi terhadap Kepercayaan Sosial. Civic Culture tidak hanya membutuhkan kepercayaan vertikal (warga ke negara), tetapi juga kepercayaan horizontal (antarwarga). Polarasi politik ekstrem yang terjadi sejak Pemilu 2014 telah merobek jalinan kepercayaan ini. Penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial menciptakan "ruang

gema" (echo chambers) di mana sikap curiga dan permusuhan terhadap kelompok yang berbeda pandangan politik menjadi normal. Runtuhnya kepercayaan sosial ini menghambat terbentuknya masyarakat sipil yang solid dan toleran, dua unsur krusial lainnya dalam demokrasi yang sehat.

Transformasi Partisipasi Politik: Dari Deliberatif ke Mobilisasi Massa

Civic Culture yang sehat ditandai oleh partisipasi politik yang bersifat otonom, rasional, dan deliberatif. Namun, yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran corak partisipasi.

1. Menurunnya Partisipasi Konvensional. Keterlibatan warga dalam diskusi publik yang substansial, keanggotaan dalam organisasi masyarakat sipil yang kritis, dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat lokal menunjukkan tren penurunan. Publik cenderung apatis terhadap proses politik formal karena merasa suara mereka tidak lagi signifikan.
2. Bangkitnya Partisipasi Digital dan Populisme. Ruang digital menjadi arena utama partisipasi politik, terutama bagi kaum muda. Namun, partisipasi ini sering kali bersifat reaktif, emosional, dan mudah dimobilisasi oleh narasi populis dan politik identitas. Fenomena cyber troops atau "buzzer" mengubah diskusi publik menjadi ajang propaganda dan delegitimasi lawan politik. Partisipasi semacam ini lebih mengarah pada mobilisasi massa daripada keterlibatan kewarganegaraan yang otentik.
3. Penyempitan Ruang Gerak Masyarakat Sipil. Kriminalisasi terhadap aktivis, akademisi, dan jurnalis yang kritis terhadap pemerintah menjadi indikator nyata menyusutnya ruang partisipasi. Penggunaan instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara efektif membungkam suara-suara oposisi dan menciptakan "chilling effect" di kalangan masyarakat sipil. Akibatnya, partisipasi yang bersifat mengawasi dan mengkritik kekuasaan menjadi semakin berisiko.

Pelemahkan kepercayaan dan transformasi partisipasi ini secara simultan menciptakan lingkarannya setan. Rendahnya kepercayaan membuat publik enggan berpartisipasi secara konstruktif, sementara partisipasi yang didominasi oleh sentimen negatif dan mobilisasi massa semakin mengikis kepercayaan terhadap institusi dan proses demokrasi.

Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Civic Culture

Apabila erosi Civic Culture ini tidak segera diatasi, maka demokrasi Indonesia berpotensi semakin mengalami kemunduran. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan kewargaan yang menekankan pentingnya partisipasi kritis, peningkatan transparansi lembaga politik, serta pembukaan ruang dialog publik yang inklusif. Selain itu, pengendalian polarisasi di media sosial perlu diperhatikan dengan mendorong literasi digital dan memperkuat etika komunikasi politik.

1. Pendidikan Kewargaan (Civic Knowledge). Kurikulum sekolah dan perguruan tinggi dapat memasukkan modul debat publik, simulasi musyawarah, dan proyek komunitas berbasis partisipasi warga. Selain itu, program literasi digital dapat membantu generasi muda membedakan informasi valid dari disinformasi, memperkuat civic competence.
2. Reformasi Partai Politik. Pemerintah dan KPU dapat mewajibkan partai politik untuk mempublikasikan laporan keuangan secara transparan, mekanisme seleksi kader berbasis kompetensi, dan audit independen. Partisipasi publik dapat dilibatkan dalam evaluasi program partai, misalnya melalui forum konsultasi daring.

3. Penguatan Civic Engagement. Pemerintah daerah dapat rutin menyelenggarakan public hearing, citizen assembly, atau participatory budgeting. Organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal juga difasilitasi untuk membentuk forum konsultasi kebijakan. Pemanfaatan platform digital bisa memperluas jangkauan partisipasi, termasuk untuk kelompok yang sulit hadir secara fisik.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah. Pemerintah dapat mengembangkan open data portal, laporan kebijakan yang mudah diakses publik, dan sistem pengaduan berbasis digital. Setiap kebijakan publik harus disertai mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan.
5. Penguatan Modal Sosial. Pemerintah dan komunitas dapat memfasilitasi kerja sama lintas sektor, misalnya forum warga, asosiasi kepemudaan, dan kelompok advokasi. Program kolaboratif antara masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan pemerintah dapat memperkuat jaringan sosial.

KESIMPULAN

Pelemahian Civic Culture di Indonesia, yang terlihat dari menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan rendahnya partisipasi deliberatif, berperan sebagai salah satu faktor utama yang dapat memicu resesi demokrasi. Fenomena ini tercermin dari meningkatnya mobilisasi massa dan demonstrasi publik, yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyalurkan aspirasi politik melalui saluran non-formal akibat kehilangan kepercayaan pada mekanisme politik resmi. Kondisi tersebut menandakan potensi stagnasi kualitas demokrasi jika tidak segera diantisipasi. Oleh karena itu, penguatan Civic Culture menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pendidikan kewargaan agar masyarakat memahami hak, kewajiban, dan mekanisme partisipasi dalam demokrasi; reformasi partai politik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik; pengembangan partisipasi publik melalui forum deliberatif dan konsultasi kebijakan; peningkatan transparansi pemerintah agar proses pengambilan keputusan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; serta penguatan modal sosial yang mendukung jaringan kepercayaan antarwarga dan komunitas sipil. Penerapan strategi-strategi ini diharapkan dapat memperkuat budaya politik yang sehat, meningkatkan legitimasi institusi demokrasi, dan menekan risiko resesi demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Culla, Adi Suryadi. (2005) "Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia." *Sociae Polites* 5, no. 23: 68–79. <https://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/512/502>
- Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democratic Recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155.
- Economist Intelligence Unit. (2024). *Democracy Index 2024: Measuring the State of Democracy*.
- Freedom House. (2024). *Freedom in the World 2024: Indonesia*. <https://freedomhouse.org>
- Indikator Politik Indonesia. (2024). Survei Nasional tentang Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf>
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). Opini Publik: Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Politik.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.